

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Variabel Dependen

2.1.1 Nilai Perusahaan

Mengoptimalkan nilai perusahaan merupakan tujuan jangka panjang suatu perusahaan. Kesejahteraan pemilik perusahaan dapat diperhatikan dari tingginya nilai perusahaan (Komarudin & Affandi, 2019). Rata-rata perusahaan mempunyai maksud untuk memiliki tingkat nilai perusahaan yang tinggi demi kepuasan para investor perusahaan. Sebuah perusahaan dikatakan berhasil dalam mencapai tujuannya ketika pemegang saham diuntungkan dari kepemilikan jumlah lembar saham. Nilai perusahaan dapat dijadikan acuan untuk memonitor kondisi sebuah perusahaan, karena dengan nilai perusahaan sudah dapat disimpulkan apakah nilai perusahaan meningkat atau menurun (Kusuma & Nuswantara, 2021). Nilai perusahaan dianggap sangat penting karena sangat berpengaruh kepada tanggapan investor terhadap perusahaan, serta merupakan indikator harga saham perusahaan yang diperjualbelikan di bursa efek. Peningkatan pada harga saham akan mengubah nilai perusahaan menjadi tinggi, diikuti dengan kekayaan dari para pemegang saham sehingga tingginya nilai perusahaan dapat memikat para investor untuk mempercayai asetnya terhadap perusahaan tersebut (Berliani & Riduwan, 2017). Keuntungan perusahaan akan bergantung dengan nilai perusahaan di masa depan, informasi kemajuan perusahaan dalam pencapaian laba akan menetapkan tinggi rendahnya nilai pada sebuah perusahaan.

Tingginya tingkat harga saham akan diikuti dengan peningkatan pada nilai perusahaan karena nilai perusahaan dinilai berdasarkan tinggi rendahnya harga saham yang diawasi oleh pemegang saham (Sasmika, 2016). Nilai perusahaan merupakan delegasi dari kepercayaan mitra pada perusahaan melalui proses kegiatan perusahaan selama beberapa periode (Putrianti & Suhartono, 2018). Pelaksanaan tata kelola perusahaan dapat meningkatkan dan memperkuat keyakinan untuk investasi dari investor dan masyarakat. Menurut Laksmi dan Budiarta (2020), nilai perusahaan dikategorikan sebagai nilai pasar dikarenakan mampu memperoleh keuntungan untuk pemegang saham jika terjadi peningkatan pada harga saham perusahaan. Menurut Putra dan Putra (2020) memaksimalkan nilai perusahaan adalah misi yang penting untuk setiap perusahaan karena jika nilai perusahaan tinggi, maka menggambarkan terjaminnya kesejahteraan pemegang saham yang merupakan salah satu tujuan utama perseoran.

2.2 Teori Variabel Independen

2.2.1 Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Good corporate governance dalam kata lain berupa program yang berguna sebagai pengatur, mengelola serta mengawasi bagaimana perusahaan tersebut berjalan supaya mencapai keberhasilan yang nantinya akan menguntungkan bagi banyak pihak diperusahaan tersebut (Maimuna, Ermaya, & Praptiningsih, 2021). Tata kelola perusahaan adalah sebuah elemen kunci untuk meningkatkan Keefisiensi pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kepercayaan investor (Triyuwono, Ng, & Daromes, 2020). Tata kelola perusahaan diperlukan untuk mempertahankan keberlanjutan usaha pada bisnis agar tidak merugikan pemegang

saham (Triyuwono *et al.*, 2020). Proses dan pengambilan keputusan yang tepat dipastikan oleh tata kelola perusahaan agar kepentingan semua pemangku kepentingan seimbang. Tata kelola perusahaan dikatakan bagus adalah yang mengarahkan praktik bisnis yang jauh dari kecurangan, adanya lingkungan kerja yang membangun dan mendukung, memiliki rasa tanggung jawab terhadap pasar dan publik, serta tercapainya kinerja keuangan yang akurat dan sehat. Tata kelola perusahaan yang baik akan menimbulkan pengaruh yang positif kepada perusahaan dalam proses pencapaian keuntungan yang diinginkan (Krisyadi & Rionaldo, 2021). Menurut Krisyadi dan Rionaldo (2021) tata kelola merupakan salah satu upaya bentuk mengurangi dampak terhadap risiko sistemik yang seharusnya diimplementasikan dengan baik oleh seluruh perusahaan.

Bisnis Indonesia (2018) menyatakan bahwa sejauh ini, sebagian besar perusahaan di Indonesia masih memiliki kelemahan di GCG. Tata kelola perusahaan menjadi salah satu pemicu krisis ekonomi di akhir tahun 90an yaitu buruknya kualitas investasi, diversifikasi usaha yang terlampaui luas, banyaknya jumlah pinjaman jangka pendek yang tidak dapat ditutupi, peranan tidak sesuai pada bidang, buruknya sistem audit, lemahnya transparansi, dan pengalagunaan penegakan hukum. Kasus-kasus diatas mendorong Indonesia membentuk Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (KNKG) tahun 1999 dan Peta Arah Tata kelola yang dipimpin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal 2014 untuk mengatasi kelemahan tata kelola perusahaan di Indonesia. Peringkat ASEAN *Corporate Governance Score card* (ACGS) Indonesia yang dinilai dua

tahunan dengan rata-rata mengidikasikan pertumbuhan positif adalah sebesar 0,3%, dari 70,59 pada tahun 2017 dan menjadi 70,8 pada tahun 2019.

2.2.2 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris memegang pengendalian tertinggi dalam mengawasi manajemen perusahaan serta bertanggung jawab atas hasilnya. Peningkatan pada nilai perusahaan juga menunjukkan meningkatnya performa perusahaan. Manajemen perusahaan juga sangat berperan untuk meningkatkan nilai perusahaan, untuk menghindari kemungkinan dampak negatif dari manajemen perusahaan maka diperlukan kontrol dan nasihat yang baik dari dewan komisaris (Kusuma & Nuswantara, 2021). Ukuran dewan komisaris merupakan dewan yang dibentuk *shareolders* dan menjadi wakil *shareholders* dalam manajemen perusahaan sebagai pengawas operasional (Simamora, 2017). Banyaknya anggota dewan komisaris yang ditetapkan haruslah sesuai dengan kompleksitas yang sedang berlangsung di perusahaan. Jumlah dewan komisaris yang bertambah akan memiliki insentif lebih baik untuk mengurangi kecurangan perusahaan agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan dapat menaikkan citra perusahaan, dimana hal ini dapat meningkatkan nilai perusahaan pula (Adnyana & Adwishanti, 2020). Dewan komisaris memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap pihak manajemen (Sedani & Ayu, 2021). Menurut Anggraeni (2020), dewan komisaris merupakan anggota yang menciptakan komite audit yang berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi aktivitas perseroan.

Dewan komisaris memiliki kewajiban untuk mengawasi kebijakan jalannya pengurusan perseroan yang dilaksanakan oleh direksi, mengawasi pelaksanaan

rencana jangka panjang dan pendek perusahaan, memberikan nasihat kepada direksi, ketentuan anggaran perusahaan, serta keputusan rapat umum pemegang saham sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku, agar tercapainya visi misi perusahaan. Menurut Nurjanah dan Amrozi (2021) tugas dewan komisaris adalah menjalankan komunikasi dan nasehat serta pengawasan terhadap dewan direksi agar tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan baik. Pengetahuan dewan komisaris tentang tata kelola untuk menjalankan pengawasan harus ada di suatu perusahaan. Dewan komisaris dengan jabatan rangkap pada perusahaan lain dinilai banyak pengalaman dan pemahaman terkait tata kelola perusahaan, sehingga mampu melacak kecurangan oleh manajemen (Wirayana & Sudana, 2018).

2.2.3 Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan personel yang direkrut dari luar perusahaan yang bersifat publik. Komisaris independen ialah orang yang tidak memiliki kaitan atau kepentingan terhadap pemegang saham pengendali, direksi atau dewan komisaris (Sahrir, Syamsuddin, & Sultan, 2021). Komisaris tersebut dipilih berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Dewan komisaris independen dianggap mampu mengontrol manajer dengan baik, sehingga dapat mencegah kecurangan saat menyajikan laporan keuangan (Trisnawati, Sulistyowati, & Wiyadi, 2019). Keberadaan komisaris independen dikatakan penting karena sering ditemukannya tindakan yang tidak sehat seperti kegiatan yang mengandung kepentingan pribadi dalam perusahaan publik, oeh karena itu dengan adanya komisaris independen, maka dapat mendorong dan

membuat iklim yang lebih objektif, serta meningkatkan kesetaraan dan keadilan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Memiliki komisaris independen di dalam perusahaan dapat memperketat pengawasan kinerja dewan direksi dan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen (Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Semakin bertambahnya perusahaan yang melangsungkan IPO (*Initial Public Offering*), penjualan saham kepada masyarakat, maka akan meningkatkan kebutuhan terhadap komisaris independen.

Ketentuan banyaknya komisaris independen pada perseroan adalah minimal 30% dari seluruh personel komisaris. Komisaris independen bertugas dan bekerja untuk mengawasi dan memberikan nasihat mengenai kondisi manajerial perusahaan kepada manajemennya sehingga berdampak positif terhadap nilai perusahaan (Kusuma & Nuswantara, 2021). Dewan komisaris independen adalah perwakilan pemegang saham dalam memastikan setiap keputusan manajer merupakan kepentingan perusahaan demi mencapai tujuan perusahaan (Trisnawati *et al.*, 2019). Seorang komisaris independen memiliki hak untuk menyampaikan perbedaan pendapat terhadap anggota dewan dan dicatat dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris serta opini komisaris independen akan dimasukkan ke dalam laporan tahunan apabila pendapatnya berbeda secara material. Menurut Martha dan Jati (2021), dewan komisaris independen bertujuan untuk mengetahui sebesar apa pengaruh dewan komisaris independen yang tidak termasuk anggota manajemen ataupun pemegang saham mayoritas terhadap tata kelola perusahaan. Diharapkan fungsi pengawasan dan pengendalian komisaris independen terhadap direksi dapat lebih objektif dan seksama. Komisaris independen dapat menetralsir

dan berperan dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan manajer juga dapat memegang kendali atas kearifan pimpinan (Maimuna *et al.*, 2021). Dengan berjalannya fungsi pengawasan, pihak manajemen dapat terpengaruh dalam penyusunan laporan finansial sehingga dapat menghasilkan laporan laba yang berkualitas.

2.2.4 Kepemilikan Institusional

Pihak ketiga pemegang saham dan tidak memiliki kaitan terhadap perusahaan disebut kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional memberikan dukungan yang lebih luas yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan keputusan manajerial guna meningkatkan nilai perusahaan di pasar saham (Kusuma & Nuswantara, 2021). Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan pihak lembaga seperti perseroan asuransi, bank, yayasan, perseroan terbatas, serta lembaga lainnya. Suatu lembaga biasanya lebih menonjol apabila institusi menjadi pemegang saham terbanyak dibandingkan pemegang saham lainnya (Puspitadewi, Lastiningsih, & Miftah, 2021). Investor institusional dinilai mampu menjadi mekanisme pengawasan yang efektif dan efisien dalam penyusunan strategi yang tidak mudah mempercayai tindakan kecurangan laba (Berliani & Riduwan, 2017).

Menurut Madani dan Gayatri (2021) perusahaan yang kepemilikan institusionalnya tinggi cenderung memberi tekanan besar pada perseroan agar perseroan melaksanakan aktivitas sosial dan lingkungan karena investor institusional biasanya memutuskan untuk berinvestasi pada perusahaan yang pencapaian sosialnya bagus. Menurut Nugraheni dan Mertha (2019) kepemilikan institusi yang tinggi dapat meningkatkan supervisi dari investor sebagai

pemegang saham dengan tujuan agar kemungkinan perilaku oportunistik manajemen tidak terjadi, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Menurut Wirawan (2020) semakin besar kepemilikan saham oleh institusi maka penggunaan aktiva akan efektif dan diharapkan bias menjadi pencegahan terhadap pemborosan dari pihak manajemen. Kepemilikan Institusional penting untuk pengawasan terhadap manajemen yang lebih optimal, dapat mencegah perilaku oportunistik yang tidak selaras dengan tujuan perusahaan agar mampu mendorong kinerja manajemen lebih meningkat dan berdampak positif pada nilai perusahaan. Kepemilikan institusional diharapkan dapat berpartisipasi dalam semua operasi internal perusahaan dan memantau setiap perilaku oportunistik manajer. Peningkatan kepemilikan institusional juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan ditujukan agar tercapainya nilai perusahaan yang tinggi (Syahfira & Trisnaningsih, 2021).

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga memanfaatkan beberapa penelitian terdahulu yang variabelnya berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pengkajian Amatullah (2017) dengan judul “Analisis Pengaruh Faktor-Faktor *Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan” yang memanfaatkan 44 perseroan yang tergolong ke dalam perseroan indeks Kompas selama 3 tahun, yaitu periode 2012 – 2014 untuk mengetahui pengaruh dari tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan. Hasil yang ditemukan adalah kepemilikan publik, ukuran perusahaan, jumlah dewan komisaris, komisaris independen serta komite

audit tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Lestari (2017) melakukan pengkajian dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan” yang memanfaatkan 32 perseroan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 – 2014 dengan model regresi data panel. Hasil pengkajian ini mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif, sedangkan struktur modal tidak memiliki kaitan terhadap nilai perusahaan.

Thendean dan Meita (2017) mengkaji pengaruh antara tata kelola perusahaan yang baik terhadap nilai perusahaan dengan memanfaatkan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Penelitian ini memanfaatkan 9 perseroan bidang asuransi tahun 2011 – 2015 dengan judul “Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Dewan Direksi terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi”. Hasil yang ditemukan yaitu ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan variabel moderasi kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi kedua variabel independen terhadap nilai perusahaan.

Dewanti dan Djajadikerta (2018) melakukan pengkajian dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan pada Industri Telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia” untuk menguji hubungan kinerja keuangan dan tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan. Objek pengkajian yang dimanfaatkan yaitu 6 perseroan bidang telekomunikasi dengan hasil pengkajian yaitu *current ratio*, *receivable turnover*,

debt to equity ratio, *earning per share*, serta keberadaan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan ROA dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil signifikan negatif ditunjukkan oleh variabel komisaris independen.

Penelitian oleh Lastanti dan Salim (2018) berjudul “Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, *Good Corporate Governance*, dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan” menghasilkan bahwa pengungkapan kewajiban sosial perusahaan, tata kelola perusahaan, serta pelaksanaan terkait kinerja keuangan memiliki dampak positif dan penting untuk nilai perusahaan secara bersamaan. Kepemilikan manajerial sebagai cakupan *good corporate governance* sebagian besar berdampak positif dan penting pada nilai perusahaan, sedangkan pengungkapan kewajiban sosial perusahaan, komisaris independen, kepemilikan institusional, kinerja keuangan, ukuran dewan direksi, serta ukuran komite secara parsial tidak berdampak signifikan pada nilai perusahaan.

Marlina dan Effendi (2019) mengkaji pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI” dengan memanfaatkan seluruh perseroan manufaktur tahun 2013 – 2016 dan metode analisis regresi linear berganda. Hasil dari pengkajian ini yaitu kedua variabel kepemilikan manajerial serta intistusional memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Poluan dan Wicaksono (2019) melakukan pengkajian terhadap 16 perseroan Badan Milik Usaha Negara (BUMN) di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2017 untuk menyelidiki hubungan antara tata kelola perusahaan yang baik terhadap nilai perusahaan dengan judul “Pengaruh Pengungkapan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017”. Hasil yang didapat yaitu kepemilikan manajerial serta komisaris independen tidak memiliki kaitan terhadap nilai perusahaan, sedangkan variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif dan komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Yanti dan Patrisia (2019) menganalisa pengaruh dari ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan dengan judul “*The Impact of Corporate Governance Mechanisms on Firm Value*” pada seluruh perseroan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2017 dengan metode analisis linear berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa seluruh variabel independen memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen.

Penelitian oleh Yopie, Supriyanto dan Chandra (2019) dengan judul “Peran Struktur Dewan Dalam Mempengaruhi Kinerja Pada Nilai Perusahaan Keluarga” menghasilkan bahwa metode penelitiannya dianalisis dengan regresi linier berganda dengan data panel sebanyak 125 perusahaan keluarga di BEI periode 2010-2014. Pandangan pada penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan keluarga yang dijalankan oleh CEO independen (profesional) mempunyai nilai perusahaan yang lebih besar daripada CEO yang terafiliasi. Kualifikasi

profesional berpengaruh negatif dan ukuran dewan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Komisaris yang independen tidak memiliki kaitan terhadap nilai sebuah perusahaan.

Hafizah (2020) mengkaji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* Tahun 2016-2018)” dengan jumlah 141 perseroan memanfaatkan metode analisis regresi linear berganda. Hasil menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial, komite audit serta ukuran perusahaan tidak memiliki kaitan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian Nurazi, Zoraya dan Wiardi (2020) dilaksanakan untuk mengidentifikasi dampak dari tata kelola perusahaan yang baik dan struktur modal terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel *intervening* berjudul “*The Influence of Good Corporate Governance and Capital Structure on Firm Value: The Mediation Role of Financial Performance*” yang memanfaatkan 79 perseroan periode 2017 – 2018 dan metode analisis regresi linear berganda. Hasil pengkajian mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional dan struktur modal memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.4 Kerangka Pemikiran

2.4.1 Hubungan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan

Dewan komisaris berperan penting untuk mengurus dan menganjurkan ide kepada direksi Perseroan terbatas (PT). Dewan komisaris tidak mempunyai hak atau otoritas penuh terhadap perusahaan secara langsung. Dewan komisaris

ditunjuk sebagai sekelompok individu yang memonitor berbagai macam pelaksanaan pekerjaan. Jumlah personel dewan komisaris dalam perusahaan merupakan definisi dari ukuran komisaris (Melawati, Nurlaela, & Wahyuningsih, 2016). Menurut Azizah *et al.* (2018), proporsi dewan komisaris yang tinggi dapat membantu dalam kualitas laba karena semakin tinggi tingkat komisaris maka tugas pengawasan semakin ketat sehingga dapat meminimalisir sifat mencari untung manajemen dan nilai perusahaan pun meningkat.

2.4.2 Hubungan Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan

Dewan komisaris yang independen berperan penting dalam mengkoordinasikan prosedur dan mengarahkan jalannya perusahaan dan menjamin bahwa pengawas memajukan pelaksanaan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Dewan komisaris independen juga merupakan inti tata kelola yang diandalkan untuk memberikan jaminan terhadap kewajiban dan kelancaran proses strategi perusahaan, pengawasan manajemen dan perusahaan dan terlaksananya akuntabilitas berjalan dengan lancar. Berdasarkan Pasal 120 ayat (1) UUPT, dalam hal Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa komisaris independen diwajibkan ada dalam dewan komisaris. Komisaris independen yang tinggi dapat meningkatkan fungsi pengamatan menjadi lebih efektif sehingga ada jaminan terhadap informasi yang perseroan sampaikan dan perseroan dapat respon positif dari para investor dan itu menaikkan nilai perseroan (Sulaeman, 2020). Menurut Widianingsih (2018) komisaris independen yang tinggi dapat menciptakan suasana yang lebih objektif dan dapat menyeimbangkan kepentingan

para pemangku kepentingan dan dapat membentuk tata kelola perusahaan yang baik, dimana nilai perusahaan pun meningkat.

Berkaitan dengan anggota dewan komisaris untuk melaksanakan tugas pengamatan dan mengusulkan anjuran efektif kepada direktur bersangkutan.

Tugas komisaris independen adalah:

- a. Menjamin perusahaan mempunyai prosedur trik strategi yang dapat diproses dengan baik dan tepat waktu dengan memperhatikan skedul, taksiran anggaran.
- b. Menjamin bahwa perusahaan memilih Pekerja yang berperan besar dan penting dengan tanggung jawab tinggi dan professional.
- c. Menjamin perusahaan dapat menguasai sistem informasi, audit, pengendalian, yang beroperasi dengan aman dan efisien.
- d. Menjamin perusahaan mengikuti prosedur hukum pemerintah dan perundangan yang ditetapkan dan nilai yang diimplementasikan perusahaan dalam melaksanakan prosesnya.
- e. Menjamin menghindari dan memperkecil risiko dan potensi gagal dapat selalu diselesaikan dengan profesional.
- f. Menjamin prinsip pada praktik visi misi tata kelola di sebuah perusahaan diterapkan dengan disiplin dan benar.

Terkait tata kelola perusahaan, kewajiban komisaris independen, yaitu:

- a. Terjaminnya sekuritas pada laporan keuangan milik perusahaan.
- b. Menerapkan perlakuan yang setara dan wajar terhadap investor golongan kecil dan orang yang berkepentingan lainnya.

- c. Menjelaskan transaksi yang memiliki kepentingan pribadi dengan penggunaan wewenang secara adil.
- d. Memastikan ketaatan perseroan kepada prosedur hukum.
- e. Memastikan tanggung jawab atas Administrasi pemegang saham.

2.4.3 Hubungan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan

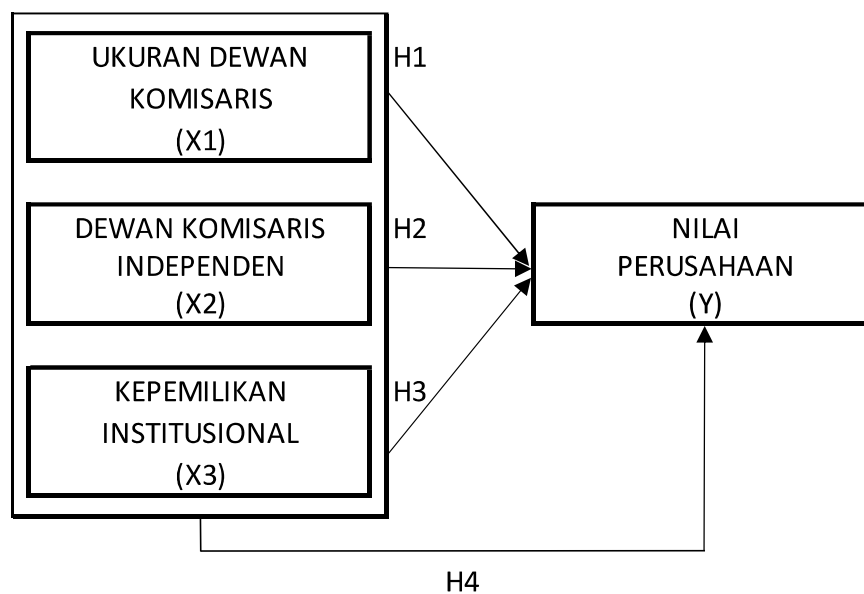
Kepemilikan institusional adalah salah satu dari banyaknya faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan karena institusi yang memiliki saham dapat mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Kepemilikan institusional adalah institusi dan lembaga-lembaga tertentu yang memiliki saham dalam sebuah perseroan. Kepemilikan institusional besar yang dimiliki perusahaan menunjukkan kemampuan mereka untuk memantau manajemen (Wardhani, Chandrarin, & Rahman, 2017). Kepemilikan organisasi yang lebih tinggi akan mengurangi perilaku cekatan direksi yang dapat menurunkan biaya kantor yang dengan harapan meningkatkannya nilai perusahaan. Tingginya saham institusional akan menghasilkan upaya pengawasan yang ketat dan maksimal. Tingkat kepemilikan pada regulasi atau institusional yang tinggi dapat menyebabkan upaya pengawasan lebih diperhatikan para investor yang dapat mencegah sikap tidak profesional dari manajer (Purba, 2021).

2.4.4 Hubungan Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan

Rencana jangka pendek perseroan yaitu memanfaatkan aset yang tersedia secara maksimal dan untuk rencana jangka panjang perseroan yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan salah satu hal yang paling

diperhatikan baik oleh perusahaan maupun masyarakat, khususnya para investor karena naik turunnya nilai perusahaan biasanya berdasarkan harga saham. Agar nilai perusahaan dapat menghasilkan hasil yang optimal, maka dibutuhkan tata kelola perusahaan yang baik. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, diantaranya yaitu, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen serta kepemilikan institusional (Yanti & Patrisia, 2019). Menurut penelitian (Hafizah, 2020), ukuran dewan komisaris, komisaris independen dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan.

Kerangka pemikiran pada penelitian ini yaitu:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Perkiraan yang bersifat sementara tentang rumusan masalah yang berbentuk pernyataan pada sebuah pengkajian disebut juga sebagai hipotesis. Hipotesis yang diuji dalam pengkajian ini ialah:

H₁ : Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

H₂ : Dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

H₃ : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

H₄ : Ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.